
Implementasi Revitalisasi Kawasan Kumuh di Kelurahan Ciptomulyo Malang Berbasis Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs)

Lintang Masitha¹, Tutik Sulistyowati²

¹Universitas Muhammadiyah Malang. e-mail: lintangmasitha@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Malang. e-mail: tutiksulistyowati@umm.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Revitalization, Implementation, Slum Area, SDGs</p> <p>DOI: http://dx.doi.org/10.22437/jssh.v8i2.35257</p> <p>Received: June 26, 2024</p> <p>Reviewed: July 18, 2024</p> <p>Accepted: December 11, 2024</p>	<p><i>This study focuses on the implementation of slum area revitalization in Kelurahan Ciptomulyo, Malang, based on Sustainable Development Goals (SDGs) principles. The research aims to evaluate the impact of infrastructure improvement, economic enhancement, and social interventions in creating a healthier, safer, and more sustainable environment. Using a qualitative approach with literature analysis, the study collects secondary data to identify the implementation and effects of the revitalization program. Findings highlight that while physical and social aspects have seen significant improvements, economic revitalization requires more attention to reduce dependency on social aid and ensure sustainable community development. The revitalization aligns with several SDGs, particularly those related to good health and well-being, quality education, clean water and sanitation, sustainable cities and communities, and partnerships for the goals. The study suggests that comprehensive strategies involving economic empowerment and stakeholder collaboration are crucial for achieving sustainable urban revitalization.</i></p>

1. Pendahuluan

Jaminan untuk bertempat tinggal yang layak di lingkungan yang sehat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini juga didukung dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs merupakan aksi global dan katalis untuk kemitraan internasional dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberikan manfaat kepada semua orang, terutama kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No One Left Behind*" atau "Tidak Ada Seorangpun yang Tertinggal."

Kawasan permukiman kumuh merupakan lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni. Karakteristiknya meliputi lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi di area terbatas, kerentanan terhadap penyakit sosial dan lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah. Selain itu, kawasan ini biasanya tidak memiliki prasarana lingkungan yang memadai, yang membahayakan keberlangsungan hidup dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997).

Kawasan kumuh memerlukan perhatian khusus dan langkah-langkah strategis untuk diperbaiki. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh harus mempertimbangkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan layak huni. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, kawasan kumuh dapat diubah menjadi area yang lebih produktif, sehat, dan menarik bagi masyarakat.

Permukiman kumuh sangat relevan dengan tujuan SDGs. SDGs menekankan pentingnya memastikan akses bagi semua orang terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, serta pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Revitalisasi kawasan kumuh sejalan dengan upaya untuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Dalam konteks ini, intervensi yang dilakukan harus meliputi perbaikan fisik infrastruktur, peningkatan ekonomi lokal, serta penguatan sosial dan institusional.

Seiring dengan meningkatnya populasi perkotaan, permasalahan kawasan kumuh semakin mendesak untuk diatasi. Peningkatan jumlah penduduk di kota-kota besar, termasuk Kota Malang, sering kali tidak diiringi dengan peningkatan infrastruktur dan layanan publik yang memadai. Akibatnya, banyak masyarakat yang terpaksa tinggal di kawasan kumuh dengan

kondisi yang tidak layak. Pemerintah Kota Malang menyadari pentingnya penanganan kawasan kumuh secara holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, revitalisasi kawasan kumuh menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui revitalisasi kawasan kumuh, diharapkan tidak hanya meningkatkan kondisi fisik lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat dengan memberikan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Upaya ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Dengan demikian, revitalisasi kawasan kumuh dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai target SDGs dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Piagam Burra yang dikutip dalam Surya (2009), revitalisasi adalah proses untuk menghidupkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi di bangunan atau area bersejarah yang telah kehilangan fungsi utamanya. Ini dilakukan dengan memperkenalkan fungsi-fungsi baru agar bangunan atau area tersebut kembali aktif dan menarik. Revitalisasi kawasan melibatkan berbagai upaya untuk mengaktifkan kembali area yang cenderung tidak aktif dan mengembangkan kawasan tersebut dengan memanfaatkan potensinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat (Kimpraswil dalam Jefrizon, 2012).

Tahapan-tahapan revitalisasi meliputi intervensi fisik yang mencakup perbaikan dan peningkatan kualitas serta kondisi fisik bangunan, pengelolaan tata hijau, sistem konektivitas, tanda/reklame, dan ruang terbuka di kawasan tersebut; rehabilitasi ekonomi dengan meremajakan artefak urban untuk mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan serta revitalisasi sosial/institusional yang bertujuan menciptakan lingkungan menarik dan membangun komunitas yang lebih kuat serta institusi yang berfungsi dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan mendalam dampak revitalisasi kawasan kumuh di Kelurahan Ciptomulyo terhadap kualitas hidup masyarakat setempat, dengan fokus pada bagaimana perbaikan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan intervensi sosial yang dilakukan sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program revitalisasi tersebut berhasil dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta memperkuat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek revitalisasi.

2. Metodologi

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode analisis literatur untuk mengevaluasi dampak revitalisasi kawasan kumuh di Kelurahan Ciptomulyo, dengan fokus pada pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan analisis dokumen, untuk mengidentifikasi implementasi dan dampak program berdasarkan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).

3. Kajian Pustaka

3.1 Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh merujuk pada area hunian yang tidak terstruktur dan tidak teratur, sering kali tanpa fasilitas umum seperti air bersih dan MCK, serta rentan terhadap banjir setiap tahunnya. Permukiman semacam ini juga biasanya memiliki sanitasi yang buruk, sistem pembuangan limbah yang tidak memadai, dan akses terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh ditandai dengan bangunan yang tidak teratur, tingkat kepadatan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta infrastruktur yang tidak memadai. Bangunan di permukiman kumuh sering kali dibangun dengan bahan yang kurang berkualitas, tanpa izin resmi, dan tanpa memperhatikan aspek keamanan atau kenyamanan. Secara legal, permukiman kumuh dibagi menjadi dua jenis, yaitu kategori Slum yang diakui sebagai daerah permukiman, dan kategori Squatter Settlement yang merupakan permukiman liar di lahan yang tidak sah seperti pinggir rel kereta atau sungai, pasar, atau tempat pembuangan sampah. Permukiman liar ini sering kali berada di lokasi yang berbahaya dan tidak cocok untuk hunian, sehingga penghuninya menghadapi risiko tinggi terhadap bencana alam dan masalah kesehatan. Dari perspektif penanganan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, upaya untuk memperbaiki permukiman kumuh dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Pemugaran melibatkan perbaikan dan pembangunan kembali prasarana, sarana, dan utilitas umum agar dapat berfungsi

secara optimal. Ini termasuk perbaikan jalan, drainase, penyediaan air bersih, dan fasilitas sanitasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kondisi lingkungan sehingga menjadi lebih sehat dan layak huni. Peremajaan, di sisi lain, dilakukan dengan penataan kembali secara menyeluruh, termasuk pembangunan baru prasarana, sarana, dan utilitas umum. Ini melibatkan renovasi besar-besaran atau bahkan pembangunan ulang kawasan tersebut untuk menciptakan permukiman yang lebih teratur dan terencana. Pemukiman kembali adalah langkah terakhir yang melibatkan relokasi masyarakat dari permukiman kumuh ke lokasi baru yang telah disiapkan dengan fasilitas yang memadai. Pendekatan ini biasanya dilakukan ketika kawasan kumuh tersebut berada di lahan yang tidak sesuai untuk hunian, seperti di pinggir rel kereta api atau di daerah rawan bencana. Semua langkah ini diambil dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi penduduknya, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

3.1 Revitalisasi Kawasan Kumuh

Revitalisasi mengacu pada upaya untuk menghidupkan kembali bangunan atau lingkungan bersejarah yang telah kehilangan vitalitas fungsi aslinya melalui pemberian fungsi baru. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk membuat bangunan atau lingkungan tersebut kembali aktif secara sosial dan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan daya tarik dan memberikan kontribusi positif terhadap kualitas lingkungan sekitarnya. Revitalisasi juga berusaha untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki oleh kawasan yang cenderung tidak aktif, dengan harapan dapat memberikan peningkatan signifikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya (Kimpraswil dalam Jefrizon, 2012).

Kawasan kumuh perlu direvitalisasi karena kondisi fisik yang tidak layak huni, masalah kesehatan yang sering muncul akibat sanitasi buruk, kepadatan penduduk yang tinggi, serta tingkat ekonomi rendah yang mengakibatkan akses terbatas terhadap layanan dasar. Revitalisasi ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Selain itu, revitalisasi kawasan kumuh juga berperan dalam mengembangkan lingkungan yang lebih sehat, meningkatkan estetika kota, serta menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Dengan revitalisasi yang efektif, diharapkan kawasan kumuh dapat menjadi pusat kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh penduduknya, sejalan dengan komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan seperti yang diamanatkan dalam SDGs.

3.2 Prinsip SDGs dalam Konteks Revitalisasi

Prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dalam konteks revitalisasi kawasan kumuh mengacu pada kerangka global yang berusaha mencapai pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia, inklusi sosial yang melibatkan semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta pembangunan yang berkelanjutan yang memperhitungkan efisiensi penggunaan sumber daya, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Kolaborasi antarstakeholder seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta penerapan inovasi teknologi yang ramah lingkungan, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Alisjahbana dan Murniningtyas (2018: 63), SDGs desa merupakan upaya terpadu untuk menciptakan desa yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan, terdiri dari 18 tujuan yang dikelompokkan ke dalam empat pilar yang saling terkait: dimensi sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola. Keempat pilar ini tidak hanya mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional tetapi juga memperkuat upaya pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah Indonesia, sebagai penandatanganan agenda SDGs, menegaskan komitmennya melalui diterbitkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menegaskan keseragaman dan komitmen nasional dalam mencapai tujuan ini.

4. Pembahasan

Revitalisasi lingkungan di kawasan permukiman kumuh, terutama di sekitar Sempadan rel kereta api Kelurahan Ciptomulyo, membawa pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Melalui berbagai upaya perbaikan infrastruktur, peningkatan kebersihan, serta penyediaan fasilitas umum yang memadai, revitalisasi ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang selama ini dihadapi oleh warga setempat.

Dengan adanya revitalisasi lingkungan, berbagai sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Ciptomulyo juga mengalami peningkatan, termasuk sarana pendidikan, kesehatan, dan umum. Peningkatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai

pengaruh revitalisasi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat di kawasan permukiman kumuh sekitar Sempadan rel kereta api Kelurahan Ciptomulyo.

Sarana Pendidikan

Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD): Di Kelurahan Ciptomulyo, terdapat beberapa sarana pendidikan dasar seperti TK dan SD. Keberadaan sarana pendidikan ini sangat penting untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di wilayah tersebut, memastikan mereka mendapatkan pendidikan dasar yang diperlukan untuk perkembangan intelektual dan sosial mereka. Pendidikan yang baik memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dengan meningkatkan kesadaran tentang kebersihan dan gaya hidup sehat.

Sarana Kesehatan

Puskesmas: Puskesmas merupakan pusat layanan kesehatan utama di Kelurahan Ciptomulyo. Puskesmas ini menyediakan berbagai layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, termasuk pemeriksaan umum, pelayanan ibu dan anak, serta imunisasi. Dengan akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan, masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, yang secara langsung berdampak positif pada kesehatan mereka.

Posyandu (17 unit): Terdapat 17 unit posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Kelurahan Ciptomulyo. Posyandu ini berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi balita dan ibu hamil, serta pusat informasi dan edukasi kesehatan bagi masyarakat. Dengan adanya posyandu, ibu dan anak mendapatkan perhatian khusus yang diperlukan untuk mencegah malnutrisi dan penyakit yang umum pada masa kehamilan dan pertumbuhan anak.

Poliklinik/Balai Pelayanan Masyarakat (1 unit): Selain Puskesmas dan posyandu, terdapat satu unit poliklinik atau balai pelayanan masyarakat yang menyediakan layanan kesehatan lebih spesifik dan mendalam, termasuk pemeriksaan spesialis dan penanganan penyakit kronis. Poliklinik ini membantu menangani kasus-kasus yang memerlukan perawatan lebih lanjut, sehingga meningkatkan kualitas perawatan kesehatan di wilayah tersebut.

Sarana Umum

Sarana Olahraga (7 unit): Di Kelurahan Ciptomulyo terdapat 7 unit sarana olahraga yang tersebar di seluruh wilayah. Sarana ini menyediakan fasilitas untuk berbagai kegiatan olahraga, yang penting untuk menjaga kesehatan fisik masyarakat dan menyediakan tempat bagi interaksi

sosial yang positif. Aktivitas fisik yang cukup berkontribusi pada pencegahan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi.

Sarana Kesenian/Budaya (1 unit): Terdapat satu unit sarana kesenian atau budaya di Kelurahan Ciptomulyo. Sarana ini digunakan untuk mengadakan berbagai kegiatan budaya dan kesenian, yang berperan dalam melestarikan tradisi lokal serta memberikan ruang bagi ekspresi kreativitas masyarakat. Kegiatan kesenian dan budaya ini juga dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental.

Balai Pertemuan (1 unit): Balai pertemuan di Kelurahan Ciptomulyo digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, termasuk rapat, pertemuan, dan acara-acara sosial. Keberadaan balai ini sangat penting untuk memperkuat ikatan komunitas dan memfasilitasi komunikasi serta kerjasama antarwarga. Ikatan komunitas yang kuat dapat mendukung kesehatan mental dan sosial masyarakat.

Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Ciptomulyo juga mempengaruhi kesehatan masyarakat secara signifikan. Mayoritas masyarakat memiliki tempat sampah masing-masing yang diletakkan di depan rumah, namun masih banyak yang tidak memiliki tempat sampah di rumah. Sebanyak 1031 Kepala Keluarga memiliki prasarana dan sarana persampahan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sementara 792 Kepala Keluarga menggunakan sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis dan tidak terpelihara. Permasalahan sampah di Kelurahan Ciptomulyo meliputi beberapa aspek, yaitu:

Lokasi yang Sulit Dijangkau: Terdapat beberapa lokasi yang sulit dijangkau oleh alat angkut sampah, menyebabkan sampah menumpuk dan mencemari lingkungan.

Frekuensi Pengambilan Sampah: Frekuensi pengambilan sampah di beberapa tempat kurang dari dua kali seminggu, sehingga sampah seringkali menumpuk dan menjadi sumber penyakit.

Pembuangan Sampah di Lahan Kosong: Beberapa warga membuang sampah di lahan kosong, yang menyebabkan timbulnya masalah kesehatan dan lingkungan.

Belum Terpilahnya Sampah Organik dan Anorganik: Sampah belum dipilah menjadi organik dan anorganik, mengakibatkan proses pengolahan sampah menjadi tidak efisien dan menambah masalah kebersihan.

Dengan adanya revitalisasi lingkungan, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diatasi melalui perbaikan sistem pengelolaan persampahan, edukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah, serta peningkatan frekuensi dan jangkauan layanan pengangkutan sampah. Semua upaya ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang buruk.

Secara keseluruhan, revitalisasi lingkungan yang mencakup peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, umum, serta perbaikan pengelolaan persampahan di Kelurahan Ciptomulyo, membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Fasilitas yang memadai dan sistem pengelolaan yang lebih baik ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kurangnya Revitalisasi dari Bidang Ekonomi

Meskipun revitalisasi lingkungan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Ciptomulyo telah membawa berbagai perubahan positif, aspek revitalisasi ekonomi masih kurang mendapat perhatian yang memadai. Beberapa alasan yang dapat menjelaskan kekurangan ini adalah:

1. Minimnya Akses terhadap Peluang Kerja dan Usaha

Banyak warga di kawasan kumuh Ciptomulyo yang masih bergantung pada sektor informal dengan penghasilan yang tidak stabil. Tidak ada program khusus yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan dan memberikan akses kepada peluang kerja yang lebih baik.

2. Kurangnya Dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Revitalisasi lingkungan belum mencakup dukungan yang signifikan bagi pengembangan UMKM lokal. Tanpa dukungan seperti pelatihan kewirausahaan, akses ke modal, dan pemasaran, usaha-usaha kecil di wilayah ini sulit berkembang dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal.

3. Ketidacukupan Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur yang dibangun lebih banyak berfokus pada peningkatan kesehatan dan kebersihan, sementara fasilitas penunjang ekonomi seperti pasar yang layak, pusat pelatihan keterampilan, atau pusat pengembangan ekonomi komunitas belum banyak diperhatikan.

4. Kurangnya Program Pelatihan dan Pendidikan Vokasional

Tidak ada program pelatihan atau pendidikan vokasional yang terintegrasi dalam upaya revitalisasi, yang dapat membantu warga meningkatkan keterampilan mereka dan menjadi lebih kompetitif di pasar kerja.

5. Kurangnya Keterlibatan Sektor Swasta

Revitalisasi belum sepenuhnya melibatkan sektor swasta dalam menciptakan peluang ekonomi baru. Kemitraan dengan perusahaan-perusahaan untuk menyediakan pelatihan kerja, magang, atau proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dapat memberikan dampak yang signifikan.

Implikasi Kurangnya Revitalisasi Ekonomi

Ketidakseimbangan dalam revitalisasi ini menyebabkan beberapa implikasi negatif bagi masyarakat Ciptomulyo, antara lain:

- **Ketergantungan pada Bantuan Sosial:** Tanpa adanya peningkatan ekonomi, masyarakat tetap bergantung pada bantuan sosial, yang tidak memberikan solusi jangka panjang untuk masalah kemiskinan.
- **Kesenjangan Sosial yang Berkelanjutan:** Ketimpangan ekonomi tetap terjadi, di mana sebagian besar warga tetap terperangkap dalam siklus kemiskinan.
- **Keterbatasan Pengembangan Komunitas:** Kurangnya peningkatan ekonomi menghambat pengembangan komunitas yang lebih mandiri dan produktif.

Pentingnya Fokus pada Revitalisasi Ekonomi

Untuk mencapai revitalisasi yang menyeluruh dan berkelanjutan di Kelurahan Ciptomulyo, perhatian lebih harus diberikan pada aspek ekonomi. Upaya revitalisasi ekonomi bisa meliputi:

- **Program Pelatihan Keterampilan:** Memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- **Dukungan untuk UMKM:** Memberikan akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitas pemasaran bagi usaha kecil.
- **Peningkatan Akses Pembiayaan:** Menyediakan skema kredit mikro yang mudah diakses oleh masyarakat.
- **Kemitraan dengan Sektor Swasta:** Menggalang kerjasama dengan perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan pelatihan.

Dengan demikian, revitalisasi ekonomi yang lebih kuat akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Keterkaitan Revitalisasi Kawasan Kumuh Ciptomulyo dengan SDGs

Revitalisasi kawasan kumuh di Kelurahan Ciptomulyo sejalan dengan berbagai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam hal meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa SDGs yang relevan meliputi:

1. *Good Health and Well-being*: Peningkatan akses ke layanan kesehatan melalui puskesmas, posyandu, dan poliklinik membantu meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
2. *Quality Education*: Penyediaan sarana pendidikan seperti TK dan SD memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak, yang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka.
3. *Clean Water and Sanitation*: Perbaikan infrastruktur sanitasi dan pengelolaan persampahan yang lebih baik membantu memastikan akses air bersih dan lingkungan yang lebih sehat.
4. *Sustainable Cities and Communities*: Revitalisasi kawasan kumuh menciptakan lingkungan yang lebih layak huni, aman, dan inklusif bagi semua masyarakat.
5. *Partnerships for the Goals*: Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam upaya revitalisasi menunjukkan pentingnya kemitraan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan

Revitalisasi lingkungan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Ciptomulyo, terutama di sekitar Sempadan rel kereta api, telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Perbaikan infrastruktur, peningkatan kebersihan, dan penyediaan fasilitas umum yang memadai telah meningkatkan kualitas hidup serta memperbaiki kondisi kesehatan warga setempat. Peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, dan umum, termasuk pengelolaan persampahan yang lebih baik, telah menunjukkan hasil yang positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni. Namun, aspek revitalisasi ekonomi di kawasan ini masih kurang mendapat perhatian, yang menyebabkan masyarakat tetap bergantung pada bantuan sosial, kesenjangan sosial yang berkelanjutan, dan keterbatasan pengembangan komunitas yang lebih mandiri dan produktif.

Revitalisasi kawasan kumuh di Kelurahan Ciptomulyo sejalan dengan berbagai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa SDGs yang relevan meliputi Good Health and Well-being, Quality Education, Clean Water and Sanitation, Sustainable Cities and Communities, serta Partnerships for the Goals.

Saran

Untuk mencapai revitalisasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, diperlukan pengembangan program pelatihan keterampilan yang relevan, dukungan bagi pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur ekonomi yang memadai, penyediaan skema kredit mikro yang mudah diakses, peningkatan keterlibatan sektor swasta, serta edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan, kesehatan, dan pengelolaan persampahan yang baik.

Daftar Pustaka

- Sakdiah, C., & Rahmawati, D. (2021). Strategi penanganan permukiman kumuh kawasan DAS Metro Kota Malang berdasarkan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), C223-C230.
- Surya, R. Z. (2018). PEMETAAN KESELARASAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) PADA RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 4(1).
- Radas, R. V., Dua, P. A. K., & Gelung, F. (2023). STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DISAMPADAN REL KERETA API. *Prosiding SEMSINA*, 4(2), 88-90.
- Napitupulu, M. D. (2021). Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1-10.